

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi masyarakat di Indonesia masih sangat jauh dari kata sejahtera, masih banyak masyarakat belum memperoleh kesejahteraan yang pantas untuk kehidupannya. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi, masyarakat dianggap sejahtera ketika dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari bidang pendidikan masyarakat dikatakan sejahtera ketika memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah dan murah atau setidaknya menyelesaikan jenjang pendidikan minimal dua belas tahun bersekolah.

Kedua hal ini sangat berkaitan, dimana ketika masyarakat mendapatkan pendidikan yang murah dan mudah dijangkau maka mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak, begitupun ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang layak maka mereka dapat membiaya pendidikan mereka.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah pusat maupun daerah mempunyai andil yang sangat besar dalam mewujudkannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantu”.

Dengan begitu bisa dikatakan pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, begitu pun dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten ini berada di Provinsi Sulawesi Utara, dimana jumlah penduduk di Kabupaten ini pada tahun 2016 berjumlah 236.893 ribu jiwa.¹ Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lumbung beras di Sulawesi Utara serta memiliki potensi holtikultura. tetapi, dengan berbagai potensi itu masih terdapat penduduk yang miskin atau yang masih belum sejahtera, dimana Kabupaten ini menempati urutan ke-4 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang menyumbang kurang lebih 19,6% penduduk miskin dan

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka*, Bolaang Mongondow, CV. Garuda Star, hlm. 40.

diurutan pertama ditempati oleh Kabupaten Minahasa yang menyumbang sebesar 27,9% penduduk miskin.²

Dilihat dari Data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Statistik Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun 2015-2016

Indikator Kemiskinan	Statistik Kemiskinan	
	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	257.170	277.338
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	20.040	19.550
Presentase Penduduk Miskin (%)	8.63	8.34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.³

Dari data statistik ini, bisa dikatakan masih banyak penduduk yang miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow, dilihat dari penurunan angka penduduk miskin hanya 0,5% dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Masih banyaknya penduduk yang hanya bekerja sebagai buruh, petani ataupun pekerjaan lainnya yang penghasilannya tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini. Salah satu kendalanya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu status pendidikan yang ditempuh tidak memenuhi standar sehingga mereka tidak ada pilihan lain lagi untuk menjadi buruh ataupun pekerjaan lain dengan upah yang kecil. Ini menyebabkan orang tua tidak bisa

² *Ibid*, hlm. 193.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow*, Bolaang Mongondow, BPS Bolaang Mongondow, hlm. 64.

membayar biaya sekolah anaknya atau anak-anak lebih memilih berhenti sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga sehingga menyebabkan banyaknya siswa putus sekolah.

Dari Data Badan Pusat Statistik Jumlah Murid di Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Usia 7-25 ke Atas menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun 2016

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak sekolah lagi
0-6	4.732	2.808	-
7-12	124	33.977	241
13-15	80	10.769	1.032
16-18	-	7.209	4.953
19-24	-	2.179	12.864
25+	1.750	308	134.122
Jumlah	6.686	57.245	153.212

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.⁴

Dari data ini dapat dilihat masih banyaknya siswa putus sekolah sehingga berdampak kurangnya sumber daya manusia. Dilihat dari kondisi saat ini rata-rata penyerap tenaga kerja mensyaratkan standar paling bawah untuk merekrut pekerja dengan kualifikasi minimum lulusan SMA. Maka bisa dipastikan selain bekerja menjadi buruh atau petani, begitu banyak juga pengangguran yang ada di Kabupaten ini.

Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan untuk memenuhi keberlangsungan hidup seperti memenuhi sandang, pangan, papan, mendapatkan pendidikan yang bermutu, murah atau dapat menyelesaikan

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka, *op. cit.*, hlm. 59.

pendidikan minimal 12 tahun bersekolah belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masyarakatnya. Masih banyak masyarakat yang miskin ini bisa berdampak buruk untuk kemajuan dan perkembangan daerah, untuk pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Atas dasar latar belakang pemikiran ini, fenomena ini menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan yang sekurang-kurangnya dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Pembangunan

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau masukan kepada instansi terkait dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.